



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

***Mutu dan Relevansi Program Pendidikan Kesetaraan Paket
C di PKBM Sadina Kabupaten Garut***

Skripsi

Oleh
Muhammad Faisal Ashshiddiq
6071801036

Bandung
2022



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

***Quality and Relevance of Package C Equality Education
Program at PKBM Sadina, Garut Regency***

Skripsi

Oleh
Muhammad Faisal Ashshiddiq
6071801036

Bandung
2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

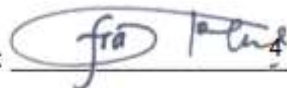
Nama : Muhammad Faisal Ashshiddiq
Nomor Pokok : 6071801036
Judul : Mutu dan Relevansi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di
PKBM Sadina Kabupaten Garut

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 24 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D

:  4 Juli 2022

Sekretaris

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

: 

Anggota

Hubertus Hasan., Drs., M.Si.

:  4 Juli 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Ashshiddiq
NPM : 6071801036
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Mutu Dan Relevansi Program Pendidikan
Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina Kabupaten
Garut

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah milik saya sendiri di bawah bimbingan pembimbing dan bukanlah merupakan karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik. Karya atau pendapat pihak lain yang saya kutip, telah ditulis mengikuti kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Adapun pernyataan yang telah saya buat ini dan ditulis langsung oleh penulis yakni saya sendiri sebagai peneliti merupakan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung

13 Juni 2022



Muhammad Faisal Ashshiddiq

ABSTRAK

Nama : Muhammad Faisal Ashshidiq

NPM : 6071801036

Judul : “Mutu Dan Relevansi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina Kabupaten Garut”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu dan relevansi dari penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina Kabupaten Garut. Paket C merupakan program yang di inisiasi pemerintah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Meskipun demikian, dari 112 penyelenggaran program Paket C (PKBM), hanya 22 lembaga PKBM di Kabupaten Garut yang sudah terakreditasi. Ditengah fenomena tersebut, diperlukan upaya untuk mengkonfirmasi kualitas Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang diselenggarakan oleh lembaga PKBM di Kabupaten Garut.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan program, dalam mengukur mutu dan relevansi perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek utama yaitu *input*, *proses*, dan *output*. Untuk memenuhi hal tersebut peneliti menggunakan model evaluasi program *countenance stake*, yang terdiri dari aspek *antecedents* sebagai input, *transactions* sebagai proses, dan *outcome*. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini alah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kemudian, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C seperti Ketua PKBM Sadina, tutor, warga belajar atau peserta didik PKBM Sadina, serta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Observasi selama penyelenggaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C berlangsung, serta dokumen-dokumen terkait penyelenggaran Program Paket C.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina dinilai bermutu dan relevan, yang dimana PKBM Sadina memiliki kualitas yang memadai dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dalam hasil evaluasi aspek *antecedents*, *transactions*, dan *outcomes* yang Dinilai sesuai berdasarkan standar atau pedoman pelaksanaan Program Kesetaraan Paket C.

Kata Kunci: Mutu dan Relevansi Program, Program Paket C, PKBM

ABSTRACT

Name : Muhammad Faisal Ashshiddiq

NPM : 6071801036

Title : "Quality and Relevance of Package C Equality Education Program at PKBM Sadina, Garut Regency"

This study aims to determine the quality and relevance of the implementation of the Package C Equality Education Program at PKBM Sadina, Garut Regency. Package C is a program initiated by the government, to improve the quality of public education. However, of the 112 implementations of the Package C program (PKBM), only 22 PKBM institutions in Garut Regency have been accredited. In the midst of this phenomenon, efforts are needed to confirm the quality of the Package C Equality Education Program organized by the PKBM institution in Garut Regency.

Based on the program implementation guidelines, measuring quality and relevance, it is necessary to pay attention to 3 (three) main aspects, namely input, process, and output. To fulfill this, the researcher uses a countenance stake program evaluation model, which consists of aspects of antecedents as inputs, transactions as processes, and outcomes. The method used in this research qualitative with a phenomenological approach. Then, data collection was obtained through interviews with parties involved in the implementation of the Package C Equality Education Program such as the Chair of PKBM Sadina, tutors, learning residents or PKBM Sadina students, as well as the Garut Regency Education Office. Observations during the implementation of the Package C Equality Education Program, as well as documents related to the implementation of the Package C Program.

The results of this study indicate that the implementation of the Package C Equivalence Program at PKBM Sadina considered quality and relevant, where PKBM Sadina has adequate quality and also relevant to the needs of the community. This is also shown in the evaluation results of aspects of antecedents, transactions, and outcomes which are assessed according to standards or guidelines for the implementation of the Package C Equivalence Program.

Keywords: Program Quality and Relevance, Package C Program, PKBM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul “Mutu dan Relevansi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina Kabupaten Garut”.

Karya tulis ilmiah diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Pada dasarnya penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan yang mungkin penulis buat. Oleh karena itu, setiap saran dan kritik yang membangun diharapkan agar membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa akan sulit terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan berbagai hal.

Untuk kedua orang tua penulis Bapak Mohammad Yusuf serta Ibu Aneu Diniyah Samsinar, terimakasih banyak atas segala do'a, motivasi, kesabaran, cinta, dan kasih sayang, serta dukungan dan segala sesuatu yang telah diberikan. Tidak lupa kepada Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Administrasi Publik, penulis sampaikan apresiasi dan ucapan

terimakasih sebesar-besarnya atas kebaikan, kesabarannya dalam membimbing, waktu agar penulis mendapatkan pengetahuan mengenai cara dan proses untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan benar, serta membantu penulis dalam memberikan makna mengenai Mutu dan Relevansi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng selaku Dekan Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Indraswari, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi ilmu Administrasi Publik, Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Muhammad Gumilang Yusamsi sebagai adik yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan canda tawa kepada peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Fikri Hazza dan Soni Tri Cahyono yang selalu memberikan bantuan, dan menemani ini penulis dalam melakukan penelitian sampai dengan selesai.
6. Bapak JS beserta jajarannya di PKBM Sadina yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara, bertukar pikiran, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusuf beserta jajarannya selaku Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan yang telah bersedia memberikan data-data

pendukung serta melakukan wawancara dalam membantu penulis menyelesaikan laporan skripsi ini.

8. Terimakasih juga kepada 3 tutor, serta 12 warga belajar atau peserta didik Program Pendidikan Kesetaraan Paket C PKBM Sadina yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan wawancara penelitian.
9. Untuk sahabat-sahabat tercinta Andre Resa Logar, Solideo Pahlawan, Arlan Kristian, Dhifan Fadhilah, Muhammad Miftah, Alfa Faatihah, Bagas Satria, Haikal Basaib, Marcellino Christian, Bagas Usada terimakasih untuk dukungan, hiburan, dan menjadi tempat curahan si hati penulis.
10. Teman dan juga sahabat seperjuangan skripsi Dhaneswara, Ecclessia Renhart, Andra Maulana, Jaccqueline Mannuela terimakasih atas semangat dan pembelajaran yang diberikan.
11. Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2018 terimakasih atas bimbingan, dukungan dan kerjasamanya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, dimana pun kalian berada terimakasih banyak untuk segalanya.

Bandung, 10 Juni 2022

Muhammad Faisal Ashshiddiq

DAFTAR SI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan Penelitian.....	15
1.5. Manfaat Penelitian.....	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
2.1. Penelitian Terdahulu.....	19
2.2. Program Sektor Publik	21
2.3. Program Pelayanan Pendidikan.....	25
2.4. Program Pendidikan Kesetaraan	29
2.4.1 Pengertian Pendidikan Kesetaraan.....	29
2.4.2 Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.....	31
2.5. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).....	34
2.6. Evaluasi Program Sektor Publik.....	37
2.6.1 Pengertian Evaluasi Program Sektor Publik	37
2.6.2 Model Evaluasi Countenance Stake.....	41
2.7. Mutu dan Relevansi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Tipe Penelitian.....	58
3.2. Peran Peneliti.....	61
3.3. Lokasi Penelitian	62

3.4.	Sumber Data	62
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	64
3.6.	Analisis Data	68
3.7.	Pengecekan Keabsahan Temuan	71
BAB IV PROFIL PENELITIAN		74
4.1.	Profil PKBM Sadina.....	74
4.1.1.	Struktur Organisasi	75
4.1.2.	Program-Program di PKBM Sadina	76
4.1.3.	Prestasi PKBM Sadina	79
4.1.4.	Mekanisme Penyelenggaraan Program Paket C	79
4.1.5.	Dasar Hukum Program Paket C	81
4.2.	Parameter Penyelenggaraan Program di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	83
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN		86
5.1.	Analisis <i>Antecedents</i>	86
5.1.1.	Peserta Didik/Warga Belajar.....	86
5.1.2.	Tutor.....	94
5.1.3.	Sarana dan Prasarana.....	99
5.1.4.	Pembiayaan	107
5.1.5.	Kurikulum	113
5.1.6.	Rangkuman Hasil Evaluasi Komponen <i>Antecedents</i>	121
5.2.	Analisis <i>Transactions</i>	125
5.2.1.	Perencanaan Proses Pembelajaran	125
5.2.2.	Proses/Pelaksanaan Pembelajaran.....	132
5.2.3.	Evaluasi Pembelajaran	144
5.2.4.	Rangkuman Hasil Evaluasi Komponen <i>Transactions</i>	150
5.3.	Analisis <i>Outcomes</i>	154
5.3.1.	Rangkuman Hasil Evaluasi <i>Outcomes</i>	161
5.4.	Mutu dan Relevansi Program Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina ..	163
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		170
6.1.	Kesimpulan.....	170
6.2.	Saran.....	171

DAFTAR PUSTAKA	175
LAMPIRAN.....	180

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data dan Tren Kenaikan RLS Kabupaten Garut 2015-2019.....	9
Tabel 2. Target dan Proyeksi Kenaikan RLS	10
Tabel 3. Data informan.....	65
Tabel 4. Daftar Tutor di PKBM Sadina	95
Tabel 5. Data Sarana dan Prasarana di PKBM Sadina.....	105
Tabel 6. Pemetaan Mata Pelajaran Tingkat 5 Persemester.....	120
Tabel 7. Rangkuman Hasil Evaluasi Antecedents.....	122
Tabel 8. Rangkuman Hasil Evaluasi Transactions	151
Tabel 9. Data Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di PKBM Sadina 2021-2022.	158
Tabel 10. Rangkuman Hasil Evaluasi Outcomes	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Jumlah Lembaga Terakreditasi PKBM di Kabupaten Garut	12
Gambar 2. Model Evaluasi Stake	45
Gambar 3. Bagan Kerangka Berfikir	57
Gambar 4. Gedung atau Bangunan PKBM Sadina.....	102
Gambar 5. Ruang Administrasi dan Rak Buku di PKBM Sadina	103
Gambar 6. Meja dan Berkas-Berkas Administrasi PKBM Sadina.....	103
Gambar 7. Rak Buku Beserta sinya (Modul, Buku Bacaan, dan Buku Penunjang)	104
Gambar 8. Toilet di PKBM Sadina	104
Gambar 9. Ruang Kelas dengan Komputer di PKBM Sadina.....	105
Gambar 10. Kegiatan Pembelajaran Akademik Program Paket C di PKBM Sadina 2021-2022	138
Gambar 11. Tampilan website menu “home” dan e-learning PKBM Sadina ...	140
Gambar 12. Kegiatan Pembelajaran Keterampilan Program Paket C di PKBM Sadina.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sektor utama yang menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan pendidikan senantiasa menjadi kebutuhan utama setiap manusia di dunia, khususnya di Indonesia. Pendidikan sendiri secara umum bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang senantiasa berdampak pada meningkatnya aspek-aspek kehidupan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam perspektif ke-Indonesiaan, pengertian fungsi, dan tujuan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3, bahwasannya:

*“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.*¹

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*²

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1

² *Ibid.*, Pasal 3

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dan dampak yang diberikan dengan adanya pendidikan bisa bermanfaat bagi individu seseorang dan kemajuan suatu bangsa secara menyeluruh. Pendidikan di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dibagi menjadi beberapa jalur, yang dimana hal tersebut juga diatur dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1, yakni pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Adapun pengertian ketiga jalur pendidikan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang berlangsung di lingkungan sekolah yang terorganisasi dan terstruktur untuk memenuhi kebutuhan belajar.
2. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga, pendidikan informal merupakan pendidikan yang pertama dan utama karena di dalam keluarga manusia belajar mengenai pengembangan sikap, watak dan perilaku serta pengembangan diri untuk pertama kalinya.
3. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang berlangsung di lingkungan masyarakat, diselenggarakan dengan teratur dan terarah tetapi fleksibel karena tidak terlalu mengikuti peraturan yang tetap dan ketat.

Dari hal diatas, dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa dalam dunia pendidikan dikenal adanya jalur pendidikan formal (sekolah), nonformal (masyarakat/ luar sekolah), dan informal (keluarga). Hal tersebut

merupakan gagasan Ki Hadjar Dewantara yang disebut dengan ‘Tri Pusat Pendidikan’, karena ketiganya Dinilai memberikan peran yang besar bagi proses pengembangan manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam berbagai dimensi.³ Sekolah yang merupakan jalur formal dalam sistem pendidikan mempunyai peran yang sangat besar untuk memberikan kontribusi demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Karena kurikulum-kurikulum yang diterapkan didesain dengan berbagai percobaan-percobaan atau penelitian-penelitian khusus untuk merumuskannya.

Akan tetapi tidak semua orang bisa beruntung mendapatkan pendidikan formal secara baik dan maksimal. Karena hal tersebut, proses pendidikan yang diterapkan diluar sekolah (nonformal) juga pada dasarnya memiliki pengaruh yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain hal tersebut, program yang diselenggarakan oleh pendidikan nonformal tidak terlepas dengan pengembangan bakat dan minat setiap individu.⁴

Pentingnya pendidikan disektor nonformal juga didukung oleh fenomena banyaknya angka putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan satu jenjang pendidikan sekolah yang disebabkan karena beberapa alasan seperti keadaan ekonomi orang tua, ketidakcocokan siswa dengan kehidupan sekolah yang bersifat elitis, formalisme yang kaku dalam pola hubungan antara guru dan murid.⁵ Fenomena siswa putus sekolah dapat terjadi di

³ Haerullah & Elihami, (2020). “*Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal dan non-formal*”. Jurnal Edukasi Non-Formal, Hlm 194. Diakses pada 11 Februari 2022

⁴ *Ibid.*, Hlm 195

⁵ Sodiq A Kuntoro, (2006). “*Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial*”. Jurnal Imiah VISI PTK-PNF, 1(2). Hlm, 14. Diakses pada 11 Februari 2022

sekolah pedesaan maupun di perkotaan. Guna bisa membantu mereka yang putus sekolah tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan, maka pendidikan nonformal menjadi alternatif layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan masyarakat akan pendidikan nonformal (PNF) senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Adapun saat ini, pendidikan nonformal digunakan dalam rangka membantu menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan 12 tahun bagi daerah memungkinkan. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan hal tersebut dibentuk “Program Pendidikan Kesetaraan” sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan supaya bisa menjangkau dan memberikan akses pendidikan kedaerah-daerah di pedesaan ataupun perkotaan.

Kemunculan Program Pendidikan Kesetaraan sendiri, dalam kacamata pendidikan nonformal yang dibagi menjadi tiga jalur, yaitu program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, paket C setara SMA lebih dipicu oleh kebutuhan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Paket A dan Paket B) di samping memberi akses pendidikan yang lebih tinggi yaitu Paket C. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut:⁶

“Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,

⁶ *Ibid.*, Hlm 14-15

penambah, dan/atau pelengkap pendidik formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”

Berdasarkan pengertian undang-undang tersebut, program kesetaraan, yang dilakukan oleh bidang pendidikan nonformal, dapat dimasukkan dalam fungsinya sebagai pengganti pendidikan formal, seolah-olah mereka yang tidak dapat mengikuti atau tidak menyelesaikan satu jenjang pendidikan formal dapat digantikan melalui program pendidikan kesetaraan.

Kebutuhan akan Program Kesetaraan yang semakin pesat, berdampak pada tingginya kemunculan satuan pendidikan nonformal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang pada awal rintisannya didirikan di tingkat kecamatan kemudian menyebar ke tiap desa atau kelurahan. Hal tersebut dikarenakan PKBM dirancang agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada.

PKBM sendiri dapat didefinisikan sebagai kelembagaan pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat. Melalui konsep pendekatan yang bermasyarakat, program-program dari pendidikan non-formal PKBM khususnya Program Pendidikan Kesetaraan, diharapkan dapat tetap mengikuti perkembangan zaman dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial dan budaya di masyarakat. Selain itu, keberadaan dan pengelolaan program pendidikan nonformal adalah strategi untuk meningkatkan perkembangan sosial masyarakat yang mengacu pada pembangunan pendidikan dengan menganalisis kebutuhan masyarakat yang pada hal ini mempunyai peran penting untuk memberikan fasilitas kepada

masyarakat untuk menggali potensi diri di lingkungannya masing-masing. Hal ini membuat PKBM disebut sebagai salah satu institusi yang berbasis masyarakat (*Based nstitution*) atau *Community Based Education*.⁷

Meskipun program yang dijalankan oleh PKBM adalah berbasis masyarakat, kualitas program tersebut perlu menjadi perhatian. Pemerintah perlu memperhatikan kualitas atau mutu serta relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM, khususnya terkait Program Pendidikan Kesetaraan sebagai program utama dalam PKBM. Dengan kata lain, PKBM sendiri dihadapkan dalam menghadapi tantangan agar PKBM ke depannya lebih berfungsi dalam melaksanakan program-program pendidikan nonformal serta pemberdayaan yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu dipertimbangkan dan dicari pemecahannya dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja PKBM.⁸

Adapun berdasarkan penelitian terdahulu menurut Syadeli et al dalam judul jurnalnya “Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Kota Serang” dijelaskan bahwa secara umum PKBM menghadapi tantangan berupa rendahnya kemampuan para pengelola untuk mengembangkan lembaga sebagai institusi PLS (Pendidikan Luar Sekolah), hal ini dibuktikan dengan perbedaan kompetensi tutor yang ada di setiap PKBM. Dengan kata lain, rata-rata tutor di PKBM sudah *qualified* tetapi dalam keahlian tidak sesuai dengan bidang tugas dan mengajarnya (*miss*

⁷ Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). (2012)

⁸ Syadeli, et al. (2020). “Kualitas Pelayanan Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) Serang”. *Jurnal Untirta*. 5(1). Hlm 32. Diakses pada 11 Februari 2022

match), ditambah kurangnya sertifikasi serta pelatihan dalam pendekatan pembelajaran dengan peserta didik. Sebagai contoh berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan tutor dengan kompetensi pendidikan agama, mengajar sebagai tutor Bahasa Indonesia dalam suatu PKBM. Hal tersebut juga disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, geografis maupun perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi, sehingga memberikan kendala tersendiri bagi PKBM dalam menghasilkan berbagai program pendidikan luar sekolah yang berbasis pada kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya.⁹

Kemudian tantangan berat lainnya yang dihadapi PKBM adalah meningkatkan mutu pengelolaan dan mutu program pendidikan luar sekolah yang ditawarkan kepada masyarakat.¹⁰ Yang dimana mutu menjadi suatu keharusan yang sering diterapkan dalam dunia bisnis dan pendidikan, seperti adanya Akreditasi Lembaga, sertifikasi ISO 9000-2001 dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut juga pemerintah menetapkan “Mutu dan Relevansi Program” sebagai parameter dalam penyelenggaraan program, yang dimana dalam hal ini Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.

“Mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan parameter berikutnya bagi kemajuan suatu PKBM. Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perlu memperhatikan input, proses, dan output dalam pelaksanaan program. Untuk mengukur mutu dan relevansi program pembelajaran yang diselenggarakan telah banyak dikembangkan model-model pengukuran dan evaluasi pendidikan serta evaluasi mutu pengelolaan lembaga secara umum, misalnya Manajemen Mutu Total (Total Quality Management atau TQM), seri international Standard Organization (ISO) dan lain-lain.”¹¹

⁹ *Ibid.* Hlm 32

¹⁰ *Ibid.* Hlm 33

¹¹ *Op Cit.*, Hlm 9

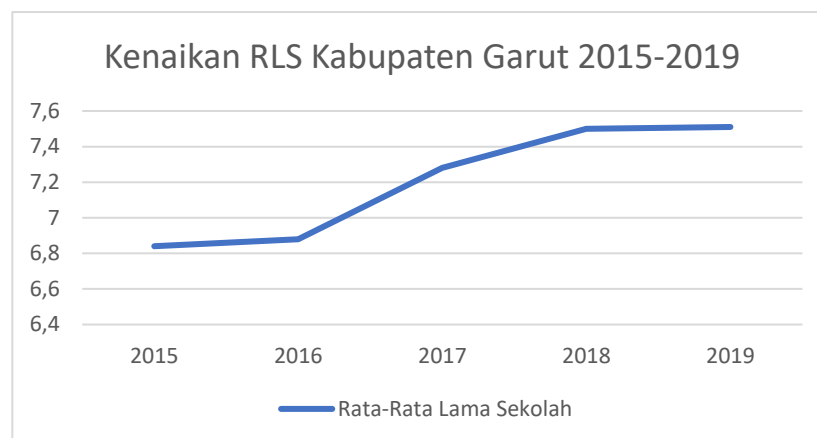
Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, serta temuan awal peneliti. Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang sesuai dalam menggambarkan hal tersebut. Yang dimana Kabupaten Garut sendiri, memiliki nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang tergolong rendah daripada daerah-daerah di Jawa Barat lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang relatif rendah dari pada 27 daerah di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Garut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat terkait skor Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Garut pada satu tahun terakhir yaitu 2021 mendapatkan skor PM 66,45¹². Hal tersebut dinilai rendah, yang dimana Kabupaten Garut menempati posisi ke-25 dari 27 daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut, yakni berbicara terkait IPM, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah pendidikan yang diukur dari Rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakatnya. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui juga bahwa tingkat RLS di Kabupaten Garut masih tergolong rendah, yang dimana berdasarkan data temuan peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, RLS Kabupaten Garut pada tahun 2019 berada di tingkat 7,51 tahun atau setara kelas 7 SMP. Tentunya hal tersebut sesuai dengan fenomena dan permasalahan pendidikan yang terjadi, dimana terdapat indikasi tingginya angka atau masih banyaknya anak putus sekolah serta

¹² Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Indeks Pembangunan Manusia 2019-2021". Diakses melalui <https://jabar.bps.go.id/indicator/26/123/1/indeks-pembangunan-manusia.html>. Diakses pada 11 Februari 2022

rendahnya akses pendidikan yang dimiliki di Kabupaten Garut. Hal tersebut juga, memperlihatkan bahwa kebijakan wajib belajar 9 tahun belum sepenuhnya tuntas.

Tahun:	2015	2016	2017	2018	2019
RLS	6,84	6,88	7,28	7,50	7,51
Kenaikan / tahun		0,04	0,4	0,22	0,01
Paket A :	811	218	200	94	470
Paket B :	1882	1518	1567	1496	1713
Paket C :	1520	2193	2181	1777	4830
Jumlah warga kesetaraan:	4213	3929	3948	3367	7013
Jumlah Total Lulusan Kesetaraan:				22.470	

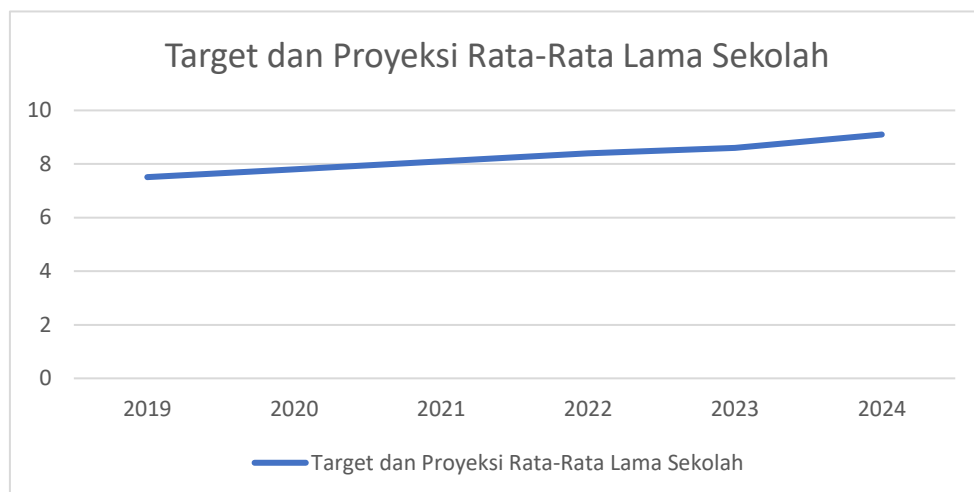


Tabel 1. Data dan Tren Kenaikan RLS Kabupaten Garut 2015-2019

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa Program Pendidikan Keseataan yang paling sering diikuti oleh masyarakat di Kabupaten Garut adalah Program Kesetaraan Paket C. Hal ini juga mendasari penelitian untuk mengetahui terkait Program Kesetaraan Paket C, dari pada Program Paket lainnya

Adapun untuk ditahun 2022 ini, Kabupaten Garut, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, menetapkan rata-rata lama sekolah yang cukup signifikan naik daripada tahun-tahun sebelumnya, yang dimana bisa dilihat berdasarkan tabel dan tren di bawah ini.

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RLS	7,51	7,8	8,10	8,40	8,60	9,1
WB yg lulus	7013	6.569	13.248	13.248	13.248	



Tabel 2. Target dan Proyeksi Kenaikan RLS
Kabupaten Garut 2019-2024

Selain data tersebut, dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyatakan bahwasannya:

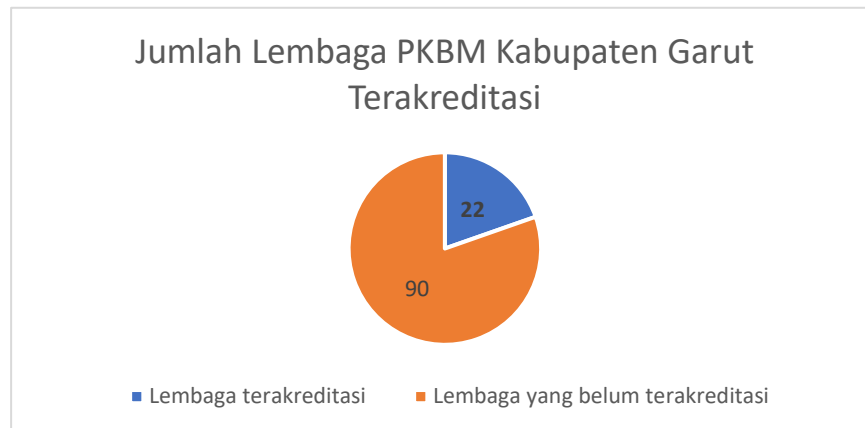
“Partisipasi masyarakat Garut sendiri tiap tahun pastinya bertambah. Tiap taunnya bisa sesuai target bisa juga tidak. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakatnya sendiri, yang dimana saat ini pendidikan, menjadu salah satu syarat utama dalam mencari pekerjaan. Hal tersebut bisa dilihat seperti pada tahun 2020 jumlah peserta didik yang mengikuti Program Kesetaraan di Kabupaten Garut

ada 17 ribuan. Total atau jumlah tersebut ternyata melebihi target yang telah ditetapkan.”¹³

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Garut senantiasa mengembangkan dan meningkatkan jumlah lembaga pendidikan nonformal melalui Program Pendidikan Kesetaraan sebagai sarana pemberian layanan kepada masyarakat sekitar, baik itu di pedesaan atau daerah Kota Garut yang ingin mendapatkan pendidikan pengganti sekolah formal. Hal itu diperlihatkan dengan jumlah PKBM yang senantiasa bertambah dari waktu ke waktunya. Saat ini jumlah PKBM aktif di Kabupaten Garut berjumlah 112 lembaga.

Meskipun begitu berdasarkan observasi awal peneliti, tidak semua PKBM di Kabupaten Garut layak memberikan pelayanan program yang bisa dinilai maksimal oleh masyarakat di Kabupaten Garut, khususnya dalam kualitas atau mutu dari setiap lembaga PKBM di Kabupaten Garut. Hal tersebut digambarkan melalui kualitas input seperti sarana prasara yang belum memenuhi, serta kualitas lulusan yang tidak terukur. Berdasarkan hal tersebut masih terdapat tantangan atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh lembaga PKBM-PKBM di Kabupaten Garut dalam peningkatan mutu atau kualitas dalam penyelenggaraanya. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari 112 lembaga PKBM yang tersebar di 34 Kecamatan Kabupaten Garut, hanya 22 PKBM atau 20 % dari lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Garut sudah terakreditasi

¹³ Wawancara dengan MY sebagai Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, (31 Januari 2022, 10:59)



Gambar 1. Diagram Jumlah Lembaga Terakreditasi
PKBM di Kabupaten Garut

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak PKBM yang mengabaikan pedoman-pedoman pelaksanaan sehingga bisa memenuhi pengakreditasi yang ada. Meskipun pada hakikatnya Program Pendidikan Kesetaraan PKBM ini masih sangat dibutuhkan, tingkat akreditasi lembaga PKBM di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan diatas terkait tantangan yang dihadapi PKBM alah terkait peningkatan mutu pengelolaan dan mutu program pendidikan, kemudian, banyak PKBM yang tidak berkelanjutan dikarenakan kemampuan lembaga PKBM yang masih rendah, dan tidak bisa menjalankan program-program sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Ditengah keterbatasan jumlah PKBM yang terakreditasi, terdapat salah satu model praktek baik PKBM di Kabupaten Garut yaitu PKBM Sadina. Selain sudah terakreditasi, PKBM tersebut juga memperoleh penghargaan pada tahun 2012 sebagai “PKBM Terbaik di Kabupaten Garut”, dan tahun 2017 sebagai “Sekolah Keren Tingkat Nasional”. Selama observasi awal

peneliti melihat PKBM Sadina, khususnya dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan, peneliti menemukan berbagai aspek yang Dinilai baik atau positif. Pertama, PKBM Sadina merupakan salah satu PKBM yang terakreditasi “B” (Akreditasi Tertinggi di Kabupaten Garut) diantara 22 PKBM yang terakreditasi lainnya. Kemudian, tingkat presensi dari peserta didik (masyarakat) yang Dinilai aktif dari pada PKBM-PKBM lainnya, yang hanya mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan hanya disaat ujian saja. Dengan kata lain, banyak di PKBM-PKBM Kabupaten Garut yang tidak melaksanakan alur program secara utuh atau maksimal. Adapun berdasarkan observasi dan temuan data peneliti PKBM Sadina memiliki tingkat presensi yang baik. Yang dimana, berdasarkan data tiga tahun terakhir (2018-2020), rata-rata kehadiran peserta PKBM Sadina pada Program Kesetaraan Paket C menyentuh angka 75-100%, berbeda dengan PKBM lainnya yang masih ada peserta dengan presentasi kehadiran sebesar 25-50%.

Kemudian berdasarkan hal tersebut, jika meninjau kembali pada pernyataan diatas bahwasannya “Mutu menjadi suatu keharusan” yang diatur dalam pedoman pelaksanaan, sebagai salah satu bagian dalam parameter penyelenggaraan program di PKBM. Maka, penelitian ini bertujuan meneliti mutu dan relevansi PKBM Sadina yang dinilai memiliki segala aspek positif dalam menjalankan salah satu programnya yaitu, Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. Adapun penelitian ini didukung dengan menggunakan metode evaluasi model *Countenance Stake* yang dikembangkan oleh Robert Stake sebagai model dalam mengevaluasi program pendidikan, yang dimana

program tersebut didasari oleh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*Mutu dan Relevansi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Di PKBM Kabupaten Garut*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dari 112 PKBM yang aktif di Kabupaten Garut, hanya 22 PKBM yang terakreditasi, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas lembaga PKBM sebagai lembaga nonformal di Kabupaten Garut tergolong rendah.
2. Ditengah keterbatasan jumlah PKBM yang terakreditasi, PKBM Sadina menjadi salah satu PKBM yang terakreditasi dan memperoleh penghargaan sebagai PKBM terbaik di Kabupaten Garut Tahun 2012
3. Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa kemampuan para pemangku kebijakan, pengelola dan tutor (guru) yang bertanggung jawab di PKBM Kabupaten Garut Dinilai masih rendah. Kemampuan ini terkait dengan upaya pengembangan PKBM. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan geografis maupun perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi para pengelola, dan tutor di PKBM. Hal ini

dikhawatirkan berimbas pada kualitas (mutu) PKBM yang dinilai rendah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan “Bagaimana mutu dan relevansi Program Kesetaraan Paket C yang diselenggarakan di PKBM Sadina?”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui mutu dan relevansi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan kedepannya dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain, khususnya sebagai bahan kajian mengenai kualitas program terutama terkait mutu dan relevansi program
 - b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dijadikan contoh sebagai bahan kajian administrasi publik tentang evaluasi atau penilaian program pendidikan kesetaraan dengan model evaluasi *countenance stake*, dan juga dapat menjadi

pembandingan dengan model atau konsep evaluasi lainnya dibangku perkuliahan.

- c. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, khususnya paket C. Serta memperdalam pengetahuan terkait penerapan salah satu model evaluasi dalam program sektor publik, yaitu model *countenance stake*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga PKBM Sadina

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, yang mana dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pengelola PKBM dalam melakukan pengembangan program layanan pendidikan kesetaraan sehingga bisa menjadi lebih baik kedepannya.

b. Bagi PKBM-PKBM lainnya

Kemudian, dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, khususnya Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori sebagai pijakan atau pedoman dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori-teori yang memiliki keterkaitan atau terdapat relevansinya dengan hal yang diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang tipe penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV : Profil Penelitian

Bab ini membahas terkait profil penelitian seperti profil lembaga PKBM Sadina yang terdiri dari, struktur organisasi, program-program, prestasi, mekanisme, dasar hukum Program Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina, dan parameter penyelenggaraan program di PKBM.

Bab V : Pembahasan Penelitian

Bab ini membahas tentang hasil serta pembahasan penelitian peneliti. Bab ini membahas analisis-analisis terkait aspek dari

model evaluasi *countenance stake* dan pembahasan terkait mutu dan relevansi dari Program Kesetaraan Paket C di PKBM Sadina

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas tentang kesimpulan serta saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.